



MODEL KEAMANAN NASIONAL KOREA SELATAN SEBAGAI PEMBELAJARAN KEAMANAN NASIONAL INDONESIA

**Kennedy Yeremia Alexander Abraham Hutagaol, Pujo Widodo, Halomoan Freddy
Sitinjak Alexandra, Bayu Setiawan, Achmed Sukendro**

Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstrak

Penelitian ditujukan untuk mempelajari bagaimana pemahaman dan penerapan konsep keamanan nasional yang dilakukan oleh masing-masing Indonesia dan Korea Selatan. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan komparatif. Dengan melihat Indonesia dan Korea Selatan sebagai sampel dengan pemilihan variabel berupa identifikasi ancaman, kerangka institusional, sumber daya manusia, teknologi dan intelijen serta kerja sama internasional. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah “Apa saja keunggulan praktik pembentukan dan pelaksanaan keamanan nasional Korea Selatan yang dapat dipelajari oleh Indonesia?” Peneliti menemukan beberapa perbedaan dan persamaan pelaksanaan keamanan nasional antara Indonesia dan Korea Selatan. Perbedaan terbesar terletak pada pemaknaan keamanan nasional. Indonesia yang mengadopsi pendekatan tradisional dan non tradisional, sedangkan Korea Selatan murni menggunakan pendekatan tradisional. Persamaan antara keduanya terletak pada upaya menjaga kedaulatan negara sebagai salah satu tujuan keamanan nasional dan pemanfaatan masyarakat dalam upaya pertahanan dan keamanan. Beberapa keunggulan keamanan nasional Korea Selatan dirangkum dan diolah menjadi saran dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Indonesia, Keamanan Nasional, Korea Selatan, Penelitian Komparatif.

PENDAHULUAN

Konsep ‘keamanan nasional’ menurut Barry Buzan (1991) adalah “...*the pursuit of freedom from threat and the ability of states and societies to maintain their independent identity and*

their functional integrity against forces of change, which they see as hostile.” Secara sederhana, keamanan adalah tentang keberlangsungan (*survival*) (Buzan, 1995). Keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup, yang terbagi

*Correspondence Address : kennedyyeremiaaah@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i12.2024.4869-4881

© 2024UM-Tapsel Press

menjadi 5 dimensi yaitu politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan (Buzan, 1991). Berkaitan dengan keamanan, konsep dari ancaman harus dipahami. Barry Buzan (Buzan, Weaver & Wilde, 1998) membagi keamanan dalam dua pendekatan kajian studi yaitu tradisional dan non tradisional dengan melihat sumber dari ancaman. Pendekatan tradisional menyatakan bahwa ancaman keamanan nasional suatu negara disebabkan kompetisi dan masalah keamanan antar negara. Contohnya adalah fenomena perlombaan senjata (*arms race*) dan pembangunan kekuatan militer (*military build-up*). Sedangkan dalam pandangan non tradisional, masalah keamanan nasional termasuk juga masalah keamanan intra negara atau dalam negara seperti SARA dan masalah keamanan transnasional seperti migrasi, kerusakan lingkungan hidup, perbatasan negara. Maka dalam kajian keamanan nasional perlu dipertimbangkan bagaimana suatu negara memersepsikan ancaman terhadap keamanan nasionalnya dan kemudian implementasinya masing-masing.

Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana Indonesia dan Korea Selatan membentuk dan mengimplementasikan keamanan nasional. Maka dari itu, konsep keamanan nasional keduanya perlu untuk dijelaskan sebelum dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, dalam Pasal 1 ayat 2 dijelaskan konsep 'ancaman' sebagai setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Keamanan Nasional (Kamnas) dapat dimaknai sebagai

kondisi maupun sebagai fungsi. Sebagai fungsi, Keamanan Nasional memproduksi dan menciptakan rasa aman, di dalamnya mencakup rasa nyaman, damai, tenteram dan tertib (Darmono, 2010). Maka pembangunan pertahanan negara diselenggarakan dengan tetap berorientasi pada keterpaduan pertahanan negara yaitu pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam rangka menghadapi ancaman, baik ancaman militer, nonmiliter, maupun hibrida. (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Keamanan nasional Korea Selatan diatur dalam hukum nasionalnya yang diberlakukan sejak tahun 1948 yaitu "*National Security Act.*" Dalam artikel 1 diatur keamanan nasional dari Korea Selatan yaitu "... to secure the security of the State and the subsistence and freedom of nationals, by regulating any anticipated activities compromising the safety of the State." Kemudian dalam artikel 2 dijelaskan konsep, secara lebih spesifik identitas, dari ancaman yang diidentifikasi oleh Korea Selatan yaitu 'organisasi anti pemerintah.' Organisasi tersebut dijelaskan sebagai "...domestic or foreign organization or group which uses fraudulently the title of the government or aims at a rebellion against the State, and which is provided with a command and leadership system." Postur pertahanan Korea Selatan diatur dalam hukum nasional "*National Defense Reform Act.*" Tujuan dari hukum nasional tersebut diatur dalam artikel 1 sebagai "... to foster the most advanced and strongest elite armed forces by providing for basic matters concerning national defense operating system, the reorganization of the military structure, and the development of a military base culture so that the Armed Forces of the Republic of Korea can actively address changes in the environment of national security and domestic and overseas conditions, such as nuclear tests by North

Korea, as well as changes in aspects of war following the development of science and technology, through the continuous reform of national defense."

Maka berdasarkan pada penjelasan, dapat ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan dalam identifikasi ancaman dan implementasi keamanan nasional Korea Selatan dan Indonesia. Korea Selatan lebih mampu menunjukkan identitas ancaman bagi keamanan nasionalnya secara jelas dan spesifik. Indonesia memiliki identifikasi ancaman keamanan nasional yang lebih umum dan luas, namun mempertimbangkan keamanan nasional dalam pandangan non tradisional. Terindikasi juga terdapat keserupaan keduanya dalam membangun konsep keamanan nasional. Korea Selatan dan Indonesia merupakan negara yang memiliki identitas, kemampuan pertahanan, demografi dan budaya yang berbeda. Namun dalam hal pelaksanaan keamanan nasional, Indonesia perlu mempelajari keunggulan-keunggulan dari negara lain yang dapat diserap untuk mengembangkan pelaksanaan keamanan nasional Indonesia. Maka dari itu pertanyaan penelitian yang dimunculkan dalam penelitian ini adalah "Apa saja keunggulan praktik pembentukan dan pelaksanaan keamanan nasional Korea Selatan yang dapat dipelajari oleh Indonesia?" Perbedaan dan persamaan keamanan keduanya akan dibahas lebih lanjut untuk kemudian dapat menemukan suatu nilai praktik dan landasan positif dari pelaksanaan dan perumusan keamanan nasional Korea Selatan yang dapat dipelajari Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2014), peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang muncul untuk

bertanya, mengumpulkan data dalam situasi natural dan sensitif terhadap manusia dan lokasi berkaitan dengan penelitian, dan analisis data yang induktif dan deduktif serta membentuk pola atau tema. Laporan akhir atau presentasi mencakup suara partisipan, refleksi dari peneliti, deskripsi kompleks dan interpretasi permasalahan, serta kontribusi terhadap literatur atau seruan untuk perubahan. Pendekatan yang akan digunakan adalah komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda (Sugiyono, 2012). Dengan variabel yang ditentukan yaitu identifikasi ancaman, kebijakan keamanan, kerangka institusional, sumber daya manusia, teknologi dan intelijen dan kerja sama internasional, sampel dalam penelitian ini adalah Indonesia dan Korea Selatan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi pustaka. Menurut Nazir (1998), "Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori (dalam penelitian ini konsep yaitu keamanan nasional) yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dan lain-lain)." Teknik analisis data yang akan digunakan adalah dengan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014). Dalam model analisis data tersebut, terdapat 4 tahapan dalam analisis data yaitu: pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data*

condensation), penyajian data (*data display*) dan verifikasi data dan penarikan kesimpulan (*conclusions: drawing/ verifying*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Ancaman

Seperti dijelaskan sebelumnya, setiap negara memiliki identitas, ideologi, budaya, nilai, sumber daya dan hubungan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga suatu negara akan memiliki identifikasi ancaman yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam penjelasan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, dijelaskan bahwa "ancaman memiliki hakikat yang majemuk, berbentuk fisik atau nonfisik, konvensional atau nonkonvensional, global atau lokal, segera atau mendatang, potensial atau aktual, militer atau nonmiliter, langsung atau tidak langsung, dari luar negeri atau dalam negeri, serta dengan kekerasan senjata atau tanpa kekerasan senjata." Ancaman terhadap keamanan manusia meliputi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personel, komunitas, dan politik. Ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi kriminal umum dan kejahatan terorganisasi lintas negara. Ancaman terhadap keamanan dalam negeri meliputi separatisme, terorisme, spionase, sabotase, kekerasan politik, konflik horizontal, perang informasi, perang siber (*cyber*), dan ekonomi nasional. Ancaman terhadap pertahanan meliputi perang takterbatas, perang terbatas, konflik perbatasan, dan pelanggaran wilayah. Sehingga spektrum ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia begitu banyak jenisnya serta dengan melihat ancaman non tradisional atau disebut juga sebagai ancaman keamanan manusia.

Sedangkan Korea Selatan dalam landasan hukum keamanannya yakni *National Security Act* Korea Selatan

1948, menetapkan bahwa ancaman keamanan terhadap keamanan nasional adalah segala tindakan yang ditujukan sebagai gerakan anti pemerintah dan gangguan terhadap sistem demokratis negara. Bahwa konsep keamanan nasional yang dianut oleh Korea Selatan menggunakan pendekatan tradisional, sehingga hal yang dianggap ancaman berupa kekuatan militer dari negara lain. Sedangkan hukum keamanan nasional tidak mengatur mengenai keamanan nasional non tradisional sehingga urgensi Korea Selatan dalam mengatur keamanan manusia belum terlihat. Dengan melihat pendekatan keamanan nasional Korea Selatan, maka ancaman keamanan nasional Korea Selatan dapat diidentifikasi secara spesifik yaitu kekuatan militer negara lain. Utamanya, ancaman keamanan nasional terhadap Korea Selatan adalah Korea Utara. Negara yang berbatasan langsung dengan Korea Selatan, memiliki persenjataan nuklir (Jun, 2024), memiliki ideologi 'Juche' yang memiliki kedekatan dengan komunis (Encyclopedia Britannica, 2024), dan dipimpin oleh rezim otoriter (Council on Foreign Relations, 2020). Sampai sekarang, Korea Selatan belum memulihkan hubungan dengan Korea Utara dan keduanya dalam status siaga.

2. Kerangka Institusional

Kerangka institusional keamanan nasional Indonesia cukup kompleks. Dengan memahami bahwa Indonesia mengategorikan ancaman menjadi ancaman militer, ancaman non militer dan ancaman hibrida. Maka dalam pembangunan pertahanan negara diselenggarakan dengan berorientasi pada keterpaduan pertahanan negara dalam bentuk pertahanan militer dan pertahanan nir militer dalam menghadapi ancaman militer, non militer dan hibrida (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Berdasarkan Undang - Undang Republik

Indonesia Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Presiden selaku penanggung jawab tertinggi dalam pengelolaan pertahanan negara dibantu oleh Dewan Ketahanan Nasional yang berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara. Dewan Pertahanan Nasional dipimpin oleh Presiden dengan keanggotaan, terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap dengan hak dan kewajiban yang sama. Anggota tetap terdiri atas Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima. Anggota tidak tetap terdiri atas pejabat pemerintah dan nonpemerintah yang dianggap perlu sesuai dengan masalah yang dihadapi.

Dalam menghadapi ancaman militer, komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Didukung oleh komponen cadangan sebagai sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

Didukung oleh komponen pendukung sebagai sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.² Dalam menghadapi ancaman non militer, maka Menteri menjadi berkaitan dengan bidang yang terancam dan di luar pertahanan menjadi penyelenggara pertahanan dengan didukung oleh lapisan elemen kekuatan bangsa lainnya seperti, instansi lainnya, masyarakat dan sumber daya.

Kerangka institusional keamanan nasional Korea Selatan tercantum dalam *National Security Council Act* sebagai konstitusi

penyelenggaraan keamanan nasional Korea Selatan. Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan terdiri dari Presiden, Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Persatuan (*Unification*), Menteri Pertahanan Nasional, Direktur Badan Intelijen Nasional dan anggota lainnya yang ditunjuk Presiden. Dewan dipimpin oleh Presiden, dengan tugas membentuk kebijakan eksternal, kebijakan militer dan kebijakan nasional berkaitan dengan keamanan nasional. Tidak ada informasi yang ditemukan mengenai pertahanan nirmiliter Korea Selatan. Namun dengan melihat pada kerangka hukum dan konsep keamanan nasional yang tercantum. Korea Selatan seakan tidak memiliki urgensi dalam menghadapi ancaman non militer dan hanya berfokus pada ancaman militer. Maka kerangka kerja institusional Korea Selatan adalah koordinasi antara Presiden, Kementerian Pertahanan, Dewan Keamanan Nasional dan Angkatan Bersenjata Republik Korea dalam perumusan kebijakan keamanan serta pengembangan dan mobilisasi militer Korea Selatan.

3. Sumber Daya Manusia

Utamanya, kekuatan utama dalam melakukan upaya pertahanan dan keamanan Indonesia adalah dengan TNI sebagai komponen utama. Namun sejatinya, Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (2) mengatur bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (*Sishankamrata*). Seperti dibahas sebelumnya, sistem pertahanan tersebut menempatkan TNI sebagai komponen utama. Komponen cadangan berisi masyarakat yang telah diperlengkapi ilmu militer guna menambah kekuatan

² Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

tempur dan mendukung komponen utama. Komponen pendukung berisi masyarakat yang tidak pernah melaksanakan pelatihan dasar militer. Namun bukan berarti masyarakat yang tidak memiliki kemampuan tempur tidak mampu melakukan upaya pertahanan negara. Dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (1) dijelaskan “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara..” Masyarakat Indonesia dengan berbagai latar belakang profesi mampu dan harus melakukan usaha pertahanan negara sesuai dengan bidang kemampuannya masing-masing. Bahwa dengan adanya pergeseran persepsi ancaman terjadi pergeseran upaya pertahanan, dan dalam upaya pertahanan dan keamanan nasional yang modern, masyarakat bisa memanfaatkan berbagai keahlian dan profesinya. Setidaknya masyarakat bertanggung jawab dalam menjaga kerukunan dan kehidupan berbangsa yang harmonis untuk mengurangi perpecahan internal guna mengurangi kerentanan keamanan.

Seperti Indonesia, kekuatan utama dalam melakukan pertahanan dan menjaga keamanan nasional adalah dengan memanfaatkan kekuatan militer. Korea Selatan juga memiliki keserupaan mengenai bagaimana masyarakat umum dimanfaatkan dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Berbeda dengan Indonesia dalam manajemen manusia Indonesia berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara dengan adanya pembentukan komponen cadangan. Korea Selatan menekankan bahwa setiap masyarakatnya adalah subjek dan elemen dari pertahanan dan keamanan negara, secara lebih spesifik wajib mengikuti pelatihan militer. Berdasarkan *Military Service Act* Korea Selatan, setiap masyarakat laki-laki Korea Selatan yang memasuki usia 18 tahun wajib untuk mengikuti program wajib militer Korea Selatan. Kemudian

dalam sistem kemiliteran Korea Selatan terdapat sistem “*draft*” dimana masyarakat diberikan pendidikan dan pelatihan militer dalam jangka waktu tertentu dan disimpan sebagai kekuatan cadangan yang dimobilisasi selama perang dan kondisi darurat. Sistem militia dimana masyarakat secara sukarela melakukan pelatihan militer dan dalam kondisi damai kembali ke kehidupan sehari-hari. Namun dalam keadaan perang, para militia akan dipanggil bertugas. Selain itu terdapat sistem militer profesional yaitu tentara, sistem tentara bayaran dan sistem tentara sukarela yang didasarkan kemauannya (*Military Manpower Administration Republic of South Korea, 2024*).

4. Teknologi dan Intelijen

Salah satu perkembangan penting dalam teknologi pertahanan Indonesia adalah modernisasi alutsista (alat utama sistem senjata). Pemerintah Indonesia telah berinvestasi dalam pembaruan dan pengadaan peralatan militer terbaru, seperti pesawat tempur, kapal perang, dan sistem pertahanan udara. Misalnya, pengadaan jet tempur Sukhoi Su-35 dan kapal perang kelas Sigma menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kekuatan tempurnya dan menghadapi tantangan regional dengan lebih efektif (*Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2021*). Selain itu, proyek pengembangan kapal selam baru, seperti kapal selam kelas Nagapasa, juga menjadi bagian dari upaya modernisasi ini, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan negara dalam melindungi perairan dan kekayaan lautnya (*Mardiana, 2022*). Teknologi radar dan sistem penginderaan juga mengalami kemajuan. Penerapan radar berbasis darat dan udara yang canggih, seperti radar AN/TPS-77, telah meningkatkan kemampuan deteksi dan pelacakan ancaman. Radar ini memberikan

kemampuan untuk memantau wilayah udara secara lebih akurat dan luas, yang penting untuk deteksi dini ancaman potensial (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2023). Selain itu, teknologi penginderaan jarak jauh dan sistem komunikasi satelit juga diperkuat untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas operasi militer. Namun, Indonesia saat ini belum mencapai target *minimum essential force* (MEF) yang menjadi acuan kemampuan militer Indonesia melakukan deterensi ancaman (Azzahra, 2024). Indonesia saat ini juga belum memiliki kemampuan yang memadai dalam menciptakan peralatan perang yang dapat bersanding dengan negara produsen peralatan militer lainnya (Kaherudin, 2024).

Dalam sektor pertahanan, Korea Selatan telah mengadopsi berbagai sistem canggih untuk memperkuat kemampuannya menghadapi potensi ancaman. Program modernisasi alutsista negara ini mencakup pengadaan dan pengembangan sistem persenjataan mutakhir. Misalnya, Korea Selatan telah memperkenalkan sistem pertahanan udara THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) untuk menghadapi potensi ancaman rudal balistik dari Korea Utara. THAAD dirancang untuk mencegat dan menghancurkan rudal balistik yang diluncurkan pada fase akhir penerbangan mereka (Jung, 2023). Selain itu, Korea Selatan juga memproduksi kapal selam kelas Jangbogo dan fregat kelas Daegu, yang merupakan bagian dari upaya modernisasi armada laut negara tersebut (Lee, 2023). Dalam hal teknologi radar dan pengawasan, Korea Selatan telah mengembangkan berbagai sistem canggih untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pengawasan. Sistem radar penginderaan jarak jauh dan radar berbasis satelit memberikan kemampuan pemantauan yang luas,

penting untuk keamanan wilayah dan deteksi dini ancaman (Kim, 2023). Radar Aegis, yang terintegrasi dalam kapal perusak kelas Sejong the Great, juga merupakan salah satu contoh teknologi radar yang digunakan untuk melindungi wilayah perairan Korea Selatan dari ancaman rudal dan serangan udara.

5. Kerja Sama Internasional

Prinsip politik internasional yang dianut oleh Indonesia adalah 'bebas aktif'. Politik Bebas Aktif mengacu pada pendekatan diplomasi yang mendorong negara untuk menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasionalnya dengan tetap menjalin kerja sama dan kemitraan dengan berbagai negara, tanpa mengambil sikap yang ekstrem atau mengikuti salah satu blok kekuatan (Sabir, 1987). Maka berkaitan dengan kerja sama internasional dalam bidang keamanan, Indonesia akan bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat dan dianggap memiliki kapabilitas militer, memiliki kepentingan yang sama, ataupun dengan pertimbangan geografi dan regional. Indonesia selama ini tidak mau mengambil sikap yang terlalu berat kepada satu pihak, dan selalu mencari jalan tengah dengan tetap menjalin hubungan dengan dua kubu besar internasional yang sedang bersaing. Tantangan bagi Indonesia adalah bahwa ancaman bagi keamanan nasional Indonesia sangat banyak, dengan sumber ancaman yang berbeda-beda. Sejauh ini Indonesia belum memiliki rekan keamanan erat yang dapat membantu Indonesia dalam menghadapi ancaman keamanan nasional. Di lain sisi, beraliansi dengan satu poros akan merusak hubungannya dengan poros yang lainnya. Sehingga keputusan yang diambil Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan internasional adalah melalui pendekatan bilateral dan melalui institusi internasional seperti

ASEAN (Widyatmoko, *et al.*, 2022; Kusumah, 2018).

Dengan identifikasi ancaman yang spesifik pada Korea Selatan, maka ancaman keamanan nasional terbesar Korea Selatan adalah Korea Utara dan para pendukungnya. Salah satu pilar utama kerja sama keamanan dan pertahanan Korea Selatan adalah aliansinya dengan Amerika Serikat. Perjanjian Aliansi Korea-Amerika (ROKA-US Alliance) yang dimulai setelah Perang Korea terus menjadi fondasi penting dalam strategi pertahanan Korea Selatan. Aliansi ini mencakup berbagai aspek, termasuk latihan militer bersama, pertukaran intelijen, dan dukungan teknologi pertahanan. Misalnya, sistem pertahanan udara THAAD yang dikerahkan di Korea Selatan adalah hasil dari kerjasama strategis dengan Amerika Serikat untuk melindungi negara dari ancaman rudal balistik (Choi, 2022). Selain itu, Korea Selatan dan Amerika Serikat secara rutin melakukan latihan militer bersama, seperti latihan *Ulchi Freedom Guardian* dan *Foal Eagle*, untuk meningkatkan kesiapsiagaan angkatan bersenjata mereka (Kim, 2023). Kerja sama keamanan antara Korea Selatan dan Jepang merupakan elemen kunci dalam strategi pertahanan regional di Asia Timur, meskipun hubungan kedua negara sering dipengaruhi oleh sejarah dan ketegangan diplomatik. Kedua negara telah membangun berbagai mekanisme untuk meningkatkan kerja sama di bidang keamanan dan pertahanan. Keduanya melakukan latihan militer bersama dan pertukaran intelijen sebagai bagian penting dari kerja sama keamanan antara Korea Selatan dan Jepang. Meskipun tidak seintensif latihan trilateral dengan

Amerika Serikat, kedua negara secara rutin melakukan latihan bilateral yang fokus pada peningkatan interoperabilitas dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman. Latihan ini sering melibatkan simulasi untuk respons terhadap ancaman maritim dan terorisme, yang membantu kedua negara meningkatkan kemampuan koordinasi dan respons cepat (Lee, 2023). Selain kerja sama praktis, kedua negara juga terlibat dalam diplomasi keamanan yang lebih luas, merespons kebijakan dan perkembangan regional yang dapat mempengaruhi stabilitas kawasan. Ini termasuk diskusi dan koordinasi mengenai kebijakan luar negeri terkait Korea Utara dan program nuklirnya. Kerja sama ini sering berlanjut dalam forum internasional seperti PBB, di mana Korea Selatan dan Jepang berupaya menangani tantangan global dan regional secara bersama (Sato, 2022).

6. Perbandingan Implementasi Keamanan Nasional Indonesia dengan Korea Selatan

Maka berdasarkan pada analisis beberapa variabel yang dilakukan sebelumnya, dapat dirangkum mengenai bagaimana kedua negara melaksanakan keamanan nasional dan dijabarkan dalam bentuk tabel untuk mempermudah perbandingan. Dengan demikian analisis keunggulan dari keamanan nasional Korea Selatan dapat diketahui lebih dalam dan kemudian menarik kesimpulan dan masukan yang dapat diambil Indonesia dengan mempelajari keamanan nasional Korea Selatan.

	Indonesia	Korea Selatan
Identifikasi Ancaman	Spektrum ancaman keamanan nasional Indonesia lebih luas dan umum, dengan menggunakan dua pendekatan keamanan yaitu tradisional dan non tradisional. Sehingga ancaman terhadap keamanan nasional yang	Hukum keamanan nasional Korea Selatan mengatur konsep ancaman sebagai gerakan anti pemerintahan. Sehingga ancaman yang diidentifikasi oleh Korea Selatan berupa ancaman terhadap kedaulatan negara. Korea Selatan menggunakan pendekatan tradisional

	dipercaya Indonesia adalah ancaman terhadap kedaulatan negara dan terhadap keamanan manusia Indonesia.	dengan melihat militer negara lain sebagai ancaman. Ancaman keamanan nasional Korea Selatan utamanya adalah Korea Utara.
Kerangka Institusional	Dalam melakukan upaya pertahanan Presiden merupakan penanggung jawab tertinggi. Dalam melaksanakan pertahanan militer, TNI muncul sebagai kekuatan utama dan komponen utama, didukung komponen cadangan dan kemudian didukung oleh komponen pendukung. Dalam pertahanan nirmiliter, komponen utama adalah kementerian yang berkaitan dengan bidang ancaman, didukung oleh lapisan pertahanan militer, instansi atau lembaga lainnya, masyarakat dan sumber daya.	Dengan mempertimbangkan pendekatan ancaman yang murni menggunakan pendekatan tradisional. Maka Korea Selatan membentuk Dewan Keamanan Nasional yang ditujukan sebagai forum koordinasi antara pejabat pemerintah berwenang dalam menanggapi ancaman nasional.
Sumber Daya Manusia	Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. TNI sebagai komponen utama, komponen cadangan dan masyarakat sebagai komponen pendukung. Bahwa upaya pertahanan dan keamanan negara adalah hak dan tugas semua masyarakat.	Sistem pertahanan dengan Angkatan Bersenjata Republik Korea sebagai kekuatan utama. Korea Selatan mewajibkan masyarakat laki-laki berumur 18 tahun mengikuti pelatihan militer. Bahwa setiap masyarakat bertanggung jawab dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.
Teknologi dan Intelijen	Indonesia sedang berada dalam tahapan modernisasi peralatan militer disertai dengan pengembangan teknologi p[engindraan. Menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki kemampuan deterensi ataupun produksi perlengkapan militer yang mampu bersaing. Namun menunjukkan komitmen yang kuat untuk berkembang.	Korea Selatan juga sedang dalam proses melakukan modernisasi perlengkapan militernya. Namun teknologi pertahanan yang digunakan oleh Korea Selatan sudah tergolong maju. Bagaimana Korea Selatan sudah memiliki THAAD, Korea Selatan juga sudah memiliki kemampuan mengembangkan radar dan teknologi pengindraan lainnya yang pada dasarnya sudah modern.
Kerja Sama Internasional	Indonesia yang menganut prinsip politik 'bebas aktif' tidak menjalin hubungan yang ekstrem kepada satu kubu. Sehingga dalam menjaga keamanan nasional dari ancaman eksternal, Indonesia mengandalkan ASEAN sebagai aktor regional. Ancaman Indonesia bersumber dari berbagai arah, namun membangun satu hubungan ekstrem dengan satu kubu akan menjadikan kubu lainnya sebagai ancaman.	Beraliansi pada Amerika Serikat dan kubunya dalam bentuk latihan militer dan kerja sama pengembangan perlengkapan dan teknologi militer. Serta bekerja sama dalam menghadapi musuh kawasan bersama yaitu Korea Utara, dengan keuntungan aliansi ikut membantu menjaga keamanan nasional Korea Selatan.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

SIMPULAN

Maka berdasarkan pada pembahasan sebelumnya. Terdapat beberapa keunggulan dari pelaksanaan keamanan nasional Korea Selatan yang dapat dipelajari oleh Indonesia. Pertama adalah berkaitan dengan sumber daya

manusia. Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar ketiga di dunia, sebuah capaian yang juga mengindikasikan bahwa Indonesia tidak kalah dari kuantitas manusia. Namun bentuk penyiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi ancaman militer hanya dalam terjadi melalui

pembentukan komponen cadangan. Sejak pada tahun 2021 sampai dengan 2023, jumlah komponen cadangan yang sudah ditetapkan berjumlah 8.574 orang. (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2023) Indonesia memiliki 1 juta pasukan dengan 400.000 diantaranya tentara aktif (Isnanto, 2024). Angka yang sangat jauh apabila dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 279 juta jiwa (Nugroho, 2024). Pada tahun 2022, Korea Selatan memiliki populasi 51 juta masyarakat, dengan 3,8 juta diantaranya adalah pasukan militer (Isnanto, 2024). Angka tersebut belum ditambahkan dengan masyarakat Korea Selatan yang sedang ataupun telah menyelesaikan wajib militernya. Sehingga perbandingan masyarakat yang diperlengkapi pendidikan dan kemampuan tempur Korea Selatan lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Penting untuk juga diingat bahwa Korea Selatan memiliki luas wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia, kondisi tersebut dengan didukung kemampuan masyarakat akan meningkatkan keamanan dan pertahanan wilayah. Peningkatan jumlah masyarakat berkemampuan tempur dan komponen cadangan perlu ditingkatkan mengingat luas wilayah Indonesia dan potensi populasi yang ada.

Selanjutnya berkaitan dengan teknologi dan kemampuan produksi perlengkapan militer. Sebagaimana dibahas sebelumnya, Indonesia saat ini sedang memasuki tahapan modernisasi dan pengembangan industri pertahanan. Hal yang sudah dilakukan banyak negara maju sehingga mereka dapat beroperasi menggunakan perlengkapan hasil produksinya sendiri, beberapa negara bahkan sudah memiliki kemampuan produksi yang layak untuk sampai pada tahap penjualan perlengkapan militernya kepada negara lain. Sehingga adanya pengembangan industri militer memungkinkan Indonesia tidak

bergantung pada produksi dari negara lain. Kemampuan Indonesia untuk memproduksi perlengkapan militernya sendiri juga dapat membantu dari penghematan biaya sampai pada pemasukan negara hasil penjualan perlengkapan militer. Indonesia kini sedang dalam tahapan pengembangan yang baik. Indonesia juga harus secepatnya mengembangkan teknologi dan industri pertahanannya, secara teknologi akan selalu maju mengikuti perkembangan waktu. Indonesia perlu cepat mengejar ketertinggalannya apabila ingin menyamakan kemampuannya dengan negara maju seperti Korea Selatan.

Keunggulan terakhir Korea Selatan adalah dalam bidang kerja sama internasional. Keunggulan Korea Selatan dalam membentuk aliansi adalah sebagai hasil dari identifikasi ancaman. Korea Selatan memiliki musuh bebuyutan yang jelas, nyata, mengancam dan dekat. Maka dengan kondisi ini, Korea Selatan memerlukan aliansi kuat yang mampu membantu melawan ancaman dari Korea Utara. Korea Utara merupakan negara dengan corak sejarah komunis dan memiliki kedekatan dengan negara seperti Rusia dan Cina. Sebagaimana dalam sejarah pecahnya Korea terjadi sejak masa perang dingin dimana Korea Utara didukung Uni Soviet dan Korea Selatan di dukung Amerika Serikat. Sehingga landasan sejarah dan hubungan antar negara yang ada menciptakan kondisi kerja sama internasional Korea Selatan. Saat ini, Indonesia menghadapi berbagai ancaman dalam kawasan. Ancaman dari kubu Cina dan Rusia serta ancaman dari kubu Amerika Serikat secara kawasan nyata dalam bentuk pembangunan kekuatan militer. Indonesia sampai saat ini belum memiliki aliansi keamanan yang dekat. Indonesia mengandalkan organisasi ASEAN dalam menghadapi ancaman dari eksternal. Sedangkan ASEAN yang diisi oleh negara Asia Tenggara tidak memiliki

kemampuan militer yang jauh melebihi Indonesia. Sehingga kumpulan negara ini belum memiliki kemampuan bersaing dengan negara besar dalam kawasan. Maka hal ini yang perlu menjadi perhatian dari Indonesia di masa depan, mencari rekan dekat yang dapat membantu Indonesia menjaga keamanan nasionalnya.

Secara keseluruhan Indonesia tertinggal oleh Korea Selatan dalam hal pelaksanaan keamanan nasional. Salah satu keunggulan Indonesia adalah bagaimana Indonesia mengadopsi pendekatan keamanan non tradisional dan mempersiapkan diri menghadapi ancaman non militer. Namun persiapan Indonesia belum cukup dengan mempertimbangkan kemampuan militer dan upaya pelaksanaan keamanan nasional yang berjalan sampai saat ini apabila dibandingkan dengan Korea Selatan. Hal signifikan lainnya yang menarik untuk dibahas adalah bagaimana Korea Selatan memilih untuk membentuk Dewan Keamanan Nasional, sedangkan institusi yang dibentuk oleh Indonesia adalah Dewan Ketahanan Nasional. Keduanya pada dasarnya memiliki keserupaan. Namun 'ketahanan' yang merupakan kata lain dari 'pertahanan' yang berasal dari kata dasar 'tahan' memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda dengan kata 'aman.' Perbedaan tersebut dapat menjadi kajian yang diteliti dalam tulisan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Azzahra, T. A. (2024, Januari 5). "Jubir Prabowo Ungkap Alasan MEF Tak Capai target di 2024." Diambil dari Detik: <https://news.detik.com/berita/d-7126873/jubir-prabowo-ungkap-alasan-mef-tak-capai-target-di-2024>

Buzan, B. (1991) "New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century" *International Affairs*, 67(3).

Buzan, B. (1991). *People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War*. Boulder: Lynne Rienner.

Buzan, B. G., Wæver, O., & de Wilde, J. H. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner.

Council on Foreign Relations. (2020, Juni 17). "North Korea's power structure." Diambil dari Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/backgrounder/north-koreas-power-structure>

Choi, H. (2022). "South Korea's Strategic Alliances and Defense Cooperation." *Journal of Asian Security Studies*, 29(4), 112-128.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Darmono, B. (2010). "Konsep Dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia." *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. XV(1).

Encyclopedia Britannica. (2024, Agustus 16). "Juche." Diambil dari Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/topic/juche>

Isnanto, B. A. (2024, Mei 30). "Daftar 10 Militer Terkuat di Dunia 2024, Indonesia Nomor Berapa?" Diambil dari Detik: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7365150/daftar-10-militer-terkuat-di-dunia-2024-indonesia-nomor-berapa#:~:text=Dilihat%20dari%20jumlah%20pasukan%2C%20Indonesia.Indonesia%20mencapai%20USD%2025%20miliar.>

Jun, B. (2024, Januari 22). "70 years after the Armistice, the Korean Peninsula still struggles for peace." Diambil dari United States Institute of Peace: <https://www.usip.org/publications/2023/09/70-years-after-armistice-korean-peninsula-still-struggles-peace>

Jung, S. (2022). "Development and Implementation of THAAD in South Korea." *Asian Security Review*, 23(2), 95-110.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Teknologi Radar dan Sistem Penginderaan*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023, Agustus 11). "Menhan Prabowo Wakili Presiden Jokowi Tetapkan 2.497 Komcad TNI TA. 2023." Diambil dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia: <https://www.kemhan.go.id/2023/08/11/menhan-prabowo-wakili-presiden-jokowi-tetapkan-2-497-komcad-tni-ta-2023.html#:~:text=Pada%20gelombang%20per-tama%20di%202021,sudah%20ditetapkan%20sebanyak%208.574%20orang>.

Khaerudin. (2024, Januari 7). "Industri pertahanan Indonesia, Sudah Mandiri Atau Masih bergantung produk luar negeri?" Diambil dari Kompas: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/07/industri-pertahanan-indonesia-sudah-mandiri-atau-masih-bergantung-produk-luar-negeri-2>

Kim, J. (2023). "Advancements in Radar and Surveillance Technology in South Korea." *Journal of Military Technology*, 17(1), 78-92.

Kim, J. (2023). "US-South Korea Military Exercises and Strategic Partnership." *International Defense Review*, 30(1), 54-71.

Kusumah, R. W. (2018). "Jalan Damai Menuju keamanan regional: Pendekatan ASEAN Dalam upaya Penyelesaian Konflik laut China Selatan." *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 7(2), 255-268. <https://doi.org/10.17509/factum.v7i2.15610>

Lee, M. (2023). "Modernization of South Korea's Naval Fleet: Jangbogo-Class Submarines and Daegu-Class Frigates." *Korean Defense Journal*, 31(3), 45-60.

Lee, S. (2023). "Military Exercises and Intelligence Sharing in the Korea-Japan Alliance." *International Defense Review*, 31(1), 66-80.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2021). "Modernisasi Alutsista Indonesia: Tinjauan dan Analisis." *Jurnal Pertahanan dan Keamanan*, 18(1), 34-50.

Mardiana, R. (2022). *Kapal Selam Nagapasa: Inovasi dan Pengaruh terhadap Kapabilitas Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pertahanan.

Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook* (Ed. 3). USA: Sage Publications.

Military Manpower Administration Republic of South Korea. (2024). "Kinds of the millitary service system." Diambil dari Military Manpower Administration Republic of South Korea: <https://www.mma.go.kr/eng/contents.do?mc=mma0000841>

Military Service Act Korea Selatan 2021

National Defense Reform Act Korea Selatan 2006

National Security Act Korea Selatan 1948

National Security Council Act Korea Selatan 1963

Nazir, Moh.. (1999). *Metode Penelitian* (Cet. ke-4). Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nugroho, R. S. (2024, April 25). "20 negara penduduk terbanyak di Dunia 2024, Indonesia Nomor Berapa?" Diambil dari Kompas: <https://www.kompas.com/tren/read/2024/04/25/180000765/20-negara-penduduk-terbanyak-di-dunia-2024-indonesia-nomor-berapa?page=all#:~:text=Posisi%20keempat%20negara%20dengan%20penduduk,277.534.122%20orang%20pada%202023>.

Sabir, M. (1987). *Politik Bebas Aktif :Tantangan dan Kesempatan*. Jakarta: Haji Majagung.

Sato, M. (2022). "Regional Diplomacy and Security Cooperation: The Role of South Korea and Japan." *Journal of Asian Studies*, 22(3), 55-71.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Widyatmoko, W. G., Almubaroq, H. Z., &
Saragih, H. J. (2022). "Dilema ASEAN centrality
Dan Respon ASEAN Dalam Menghadapi
Pembentukan Pakta Pertahanan antara Australia
- inggris - as (AUKUS)." *Indonesian Journal of
Peace and Security Studies* (IJPSS), 4(1), 15-30.
<https://doi.org/10.29303/ijpss.v4i1.116>